



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 7607-7615

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI Pada Laporan Keuangan Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Strategi Peningkatan Good Governance Sektor Publik

Riyani Tarigan<sup>1</sup> Olivia Kristin Lumban Gaol<sup>2</sup> Krista Bella Sihombing<sup>3</sup> M. Hamdani<sup>4</sup> Putri Kemala Dewi Lubis<sup>5</sup>  
Nela Permata Sari Lubis<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia  
[rivanitarigan2404@gmail.com](mailto:rivanitarigan2404@gmail.com)<sup>1</sup> [oliviakristinlumbangaol@gmail.com](mailto:oliviakristinlumbangaol@gmail.com)<sup>2</sup> [rstllabllasbg@gmail.com](mailto:rstllabllasbg@gmail.com)<sup>3</sup>  
[mhamdaniunimed@gmail.com](mailto:mhamdaniunimed@gmail.com)<sup>4</sup> [putrikemala@unimed.ac.id](mailto:putrikemala@unimed.ac.id)<sup>5</sup> [nelapslubis@unimed.ac.id](mailto:nelapslubis@unimed.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

*Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan bagian dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai strategi peningkatan good governance sektor publik pada periode 2023-2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada tahun 2023-2025. Data diperoleh dari sumber resmi seperti website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah, membandingkan, serta mengevaluasi penerapan komponen dari laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan, terutama dalam pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban secara lebih transparan dan komprehensif. Penerapan SAP berbasis akrual juga berkontribusi dalam mendukung terwujudnya prinsip good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan dari kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi keuangan daerah, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah.*

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Good Governance.

### Pendahuluan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan bagian penting dari reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan basis akrual untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan. Basis akrual memungkinkan pengakuan pendapatan ketika hak pemerintah timbul dan pengakuan beban saat kewajiban muncul, sehingga laporan keuangan mampu untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah secara lebih komprehensif dibandingkan dengan basis kas. Reformasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dan akuntabel. Dengan demikian, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi instrumen yang strategis dalam mendukung terwujudnya *good governance* di tingkat daerah.

Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI Pada Laporan Keuangan Di  
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Strategi Peningkatan Good Governance Sektor Publik

Secara konseptual, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan unsur laporan keuangan pemerintah yang meliputi pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.71 Tahun 2010. Informasi yang dihasilkan dari sistem akrual dinilai lebih relevan dalam menilai kinerja pemerintah karena tidak hanya menunjukkan realisasi anggaran, tetapi juga menggambarkan posisi keuangan secara menyeluruh (Indrawati, 2012). Dalam konteks penelitian ini, analisis difokuskan pada Pemerintah Provinsi di Sumatera Utara pada periode 2023-2025. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang besar, Sumatera Utara memiliki kompleksitas pengelolaan keuangan daerah yang tinggi. Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), banyaknya perangkat daerah, serta luasnya pengelolaan aset menuntut sistem akuntansi yang andal dan transparan. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas publik.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sektor publik. Akuntabilitas publik dipahami sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat (Bovens, 2006). Dalam konteks keuangan daerah, akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga kualitas pelaporan dapat dinilai secara *independent*. Menurut OECD (2016), sistem akuntabilitas fiskal yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan anggaran. Keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Sumatera Utara sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi keuangan yang terintegrasi, serta komitmen pimpinan daerah dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Dengan penerapan Standar Akuntansi yang konsisten dan didukung oleh data statistik yang valid, diharapkan tata kelola keuangan daerah dapat semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagai strategi peningkatan dari *good governance* sektor publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada periode 2023-2025 dengan dukungan pada data resmi dari Badan Pusat Statistik sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai efektivitas penerapan standar tersebut dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun anggaran 2023-2025. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada data numerik yang bersumber dari laporan keuangan resmi pemerintah daerah sehingga memungkinkan analisis yang objektif, sistematis, dan terukur. Metode kualitatif deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan daerah berdasarkan data aktual tanpa melakukan pengujian hipotesis, uji statistik inferensial, maupun analisis hubungan sebab-akibat antarvariabel. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran faktual mengenai pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tercermin dalam laporan resmi yang telah dipublikasikan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Sumber data utama meliputi laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, publikasi statistik keuangan daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dokumentasi yang dianalisis mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Data tersebut dipilih karena telah melalui proses audit dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi, sehingga layak dijadikan dasar dalam melakukan analisis kinerja keuangan daerah.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengunduh dokumen resmi dari sumber yang telah disebutkan, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 untuk memudahkan analisis perbandingan antarperiodenya. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan mengamati perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah, surplus atau defisit anggaran dari tahun ke tahun. Analisis juga mencakup pengamatan terhadap tingkat pertumbuhan dan kecenderungan (tren) keuangan daerah

selama periode penelitian ini yang berguna untuk mengetahui stabilitas fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di pemerintahan Sumatera Utara. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan komprehensif dengan menggunakan tabel data perbandingan dari komponen-komponen Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Sumatera Utara pada periode 2023-2025, sehingga fokus penelitian tetap pada pemaparan kondisi riil keuangan daerah berdasarkan data resmi yang telah diaudit. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan dan stabilitas fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2023-2025.

**Hasil dan Pembahasan**  
**Tabel 1 Data Perbandingan Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sumatera Utara Periode 2023-2025**

Uraian	2023	2024	2025
<b>Pendapatan Daerah</b>	Rp14,80 T	Rp13,23 T (89,62%)	Rp12,546 T (P-APBD)
<b>Belanja Daerah</b>	Rp14,12 T	96% serapan	Disesuaikan
<b>Pendapatan Hibah</b>	Rp80,24 M (101,51%)	-	-
<b>Pendapatan Lainnya</b>	Rp8,69 M (34,80%)	-	-
<b>Kondisi Fiskal</b>	Surplus	Terkendali	Penyesuaian Fiskal

Berdasarkan data tahun anggaran 2023, realisasi pendapatan Hibah Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp80,24 miliar dari target Rp79,06 miliar atau sebesar 101,51%. Kelebihan realisasi sebesar 1,51% mengindikasikan efektivitas dalam pengelolaan dan penerimaan dana hibah, baik dari pemerintah pusat maupun pihak lain. Hal ini mencerminkan adanya optimalisasi sumber pendanaan non-PAD dalam mendukung pelaksanaan program daerah. Sebaliknya, pada komponen pendapatan lainnya, realisasi hanya mencapai Rp8,69 miliar dari target Rp25 miliar atau sebesar 34,80%. Persentase ini menunjukkan adanya deviasi negative yang cukup signifikan dari target. Rendahnya capaian ini dapat mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan sumber pendapatan alternatif atau adanya faktor eksternal yang memengaruhi penerimaan pada pos tersebut. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember mencapai Rp13,23 triliun atau 89,62% dari total anggaran. Sementara itu, serapan belanja daerah tercatat mencapai 96% pada akhir tahun anggaran. Angka ini menunjukkan

tingkat efektivitas belanja yang tinggi meskipun realisasi pendapatan belum mencapai 100%. Kondisi tersebut menggambarkan adanya pengendalian fiskal yang cukup baik dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Memasuki tahun 2025, APBD Perubahan (P-APBD) disepakati sebesar Rp12,546 triliun, mengalami penurunan dibanding proyeksi awal akibat penyesuaian target pendapatan. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berada pada kisaran 4,55% - 4,69% (year-on-year) pada triwulan II dan III 2025. Pertumbuhan yang moderat ini berimplikasi terhadap penyesuaian kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam menetapkan target pendapatan dan belanja agar tetap realistis dan berkelanjutan.

**Tabel 2 Data Perbandingan Analisis Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) / SILPA Sumatera Utara Periode 2023-2025**

Uraian	2023	2024	2025
<b>SILPA</b>	Rp1,07 T	Rp10,99 M	Rp10,99 M
<b>Perubahan</b>	-	Turun >99%	Turun 89,37% dari proyeksi

<b>Dampak Fiskal</b>	Ruang fiskal besar	Serapan optimal	Kapasitas menurun
----------------------	--------------------	-----------------	-------------------

Pada tahun anggaran 2023, realisasi pembiayaan neto Provinsi Sumatera Utara menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp1.07 T. Angka ini mencerminkan adanya selisish lebih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah setelah memperhitungkan komponen pembiayaan. Besarnya SILPA tahun 2023 menunjukkan masih terdapat ruang fiskal yang cukup signifikan pada akhir periode anggaran. Memasuki tahun anggaran 2024, laporan realisasi anggaran per 31 Desember menunjukkan SILPA sebesar Rp10,99 miliar. Angka ini mengalami penurunan sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan SILPA 2023 sebesar Rp1,07 Triliun, maka terjadi penurunan lebih dari 99%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran tahun 2024 jauh lebih optimal dengan tingkat serapan yang lebih tinggi. Pada tahun anggaran 2025, berdasarkan Ranperda Perubahan APBD (P-APBD), penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 89,37%. Penurunan drastis penerimaan pembiayaan dari SILPA menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah mengalami penyesuaian, terutama akibat terbatasnya sisa anggaran yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan.

**Tabel 3 Data Perbandingan Analisis Neraca Keuangan Sumatera Utara Periode 2023-2025**

Uraian	2023	2024	2025
<b>Pendapatan</b>	Rp14,80 T	Rp13,23 T	±Rp12–13 T
<b>Belanja</b>	Rp14,12 T	Serapan tinggi	Disesuaikan
<b>PAD</b>	Rp10,54 T	Dominan	Potensi meningkat
<b>Pajak Daerah</b>	Rp8,12 T	Dominan	Dominan
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	Stabil	4,88%	4,53%
<b>Neraca Perbandingan</b>	-	-	Surplus US\$563,52 Juta

Pada tahun anggaran 2023, realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pendapatan sebesar Rp14,80 triliun dan belanja daerah sebesar Rp14,12 triliun yang menghasilkan posisi surplus fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi signifikan sebesar Rp10,54 triliun, dengan pajak daerah mendominasi Rp8,12 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah sangat bergantung pada sektor pajak lokal, yang menjadi penopang utama keberlanjutan belanja dan pembiayaan pemerintah provinsi. Memasuki tahun anggaran 2024, realisasi pendapatan APBD tercatat Rp13,23 triliun atau sebesar 89,62% dari target Rp14,63 triliun. Struktur pendapatan masih didominasi oleh PAD dan transfer dari pemerintah pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi wilayah pada Triwulan 1 2024 tercatat 4,88% (year-on-year) yang turut mendukung keberlanjutan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi lokal. Pada tahun 2025, perekonomian Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan tumbuh 4,53%, terutama didorong oleh sektor transportasi dan jasa. Neraca perdagangan luar negeri provinsi tercatat surplus sebesar US\$563,52 juta pada September 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian regional tetap kuat, yang berdampak positif pada potensi penerimaan daerah melalui PAD dan transfer.

**Tabel 4 Data Perbandingan Analisis Laporan Operasional (Lo) Sumatera Utara Periode 2023-2025**

Uraian	2023	2024	2025
<b>Ekuitas Akhir</b>	Rp157,54 M	Turun >Rp200 M	Stabil
<b>Belanja Operasional</b>	Rp11,53 T (80,76%)	Perlu optimalisasi	Fokus efisiensi

<b>Surplus Operasional</b>	Rp943,32 Juta	-	Proyeksi positif
<b>Temuan BPK</b>	Rp138,87 M	21 paket jalan	Evaluasi proyek strategis

Pada tahun anggaran 2023, Laporan Operasional Provinsi Sumatera Utara menunjukkan ekuitas sebesar Rp157,54 miliar pada 31 Desember 2023, menurun dibanding Rp158,77 miliar per 1 Januari 2023. Belanja operasional APBD tercatat Rp11, 53 triliun (80,76% dari total anggaran), Surplus operasional sebesar Rp943,32 juta yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang relative efektif, meskipun terdapat temuan BPK terkait potensi kelebihan pembayaran proyek infrastruktur senilai Rp138,87 miliar. Pada Tahun 2024, realisasi pendapatan APBN di Sumatera Utara hingga Juli tercatat Rp21,36 triliun (47,51% dari target tahunan). APBD 2024 disorot oleh BPK karena belanja belum optimal, terutama pada 21 paket pekerjaan jalan dan jembatan, serta beberapa kontrak strategis yang tidak sesuai.

Pemerintah provinsi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, namun perlu perbaikan efektivitas belanja dan pengawasan pegawai. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 meningkat menjadi 71,36%, sementara TPT menurun menjadi 5,60%, menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Jumlah penduduk tercatat 15,47 juta jiwa, dengan 16% berada di Kota Medan. Temuan terkait keterlibatan pegawai dalam judi online menegaskan perlunya penguatan pengawasan internal. Pada Tahun Anggaran 2025, APBD disepakati lebih dari Rp13 triliun, dengan fokus pada peningkatan PAD dan optimalisasi belanja untuk proyek strategis seperti Tol Trans Sumatera dan pengembangan Bandara Kualanamu. Kinerja operasional diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% melalui efisiensi anggaran, digitalisasi belanja, dan perbaikan infrastruktur. Serapan belanja daerah menunjukkan kinerja di atas rata-rata nasional, sementara upah minimum provinsi ditetapkan sebesar Rp2.992.559. Rencana kerja 2025 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2025, dengan evaluasi capaian tahun 2023 menjadi dasar pengambilan kebijakan operasional.

**Tabel 5 Data Perbandingan Analisis Laporan Arus Kas (LAK) Sumatera Utara Periode 2023-2025**

Uraian	2023	2024	2025
<b>Aktivitas Operasi</b>	Penerimaan & belanja rutin	Stabil	Stabil
<b>Aktivitas Investasi</b>	Infrastruktur	Rp976,21 M belanja modal	Pengadaan aset tetap
<b>Aktivitas Pendanaan</b>	Penyeimbang kas	Optimalisasi	Penutup defisit
<b>Kondisi Kas</b>	Transparan	Terkendali	Dimonitor triwulanan

Pada Tahun Anggaran 2023, Laporan Arus Kas Provinsi Sumatera Utara menyajikan informasi mengenai saldo kas per 31 Desember 2023, aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Belanja operasi tercatat sebagai porsi signifikan dari total belanja, sedangkan belanja modal digunakan untuk investasi infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jaringan. Laporan ini disusun berdasarkan basis kas untuk memberikan trans pengeluaran selama satu periode anggaran. Aktivitas pendanaan digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan kas, sementara arus kas transitoris mencatat penerimaan dan pengeluaran yang tidak termasuk dalam operasi, investasi, atau pendanaan. transparansi realisasi pendapatan. Memasuki Tahun 2024, hingga Juli, pendapatan negara di Sumatera Utara tercatat Rp21,36 triliun (47,51% dari target). Belanja difokuskan pada pegawai, barang, dan belanja modal, dengan realisasi belanja modal Rp976,21 miliar yang menjadi perhatian BPK terkait potensi kelebihan pembayaran. Laporan arus kas tahun 2024 tetap mencakup aktivitas operasi (penerimaan pajak dan transfer), investasi (pembelian aset tetap), dan pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kas daerah terus diarahkan pada transparansi dan pemantauan likuiditas yang efektif, meskipun terdapat temuan potensi risiko pada belanja modal. Pada Tahun Anggaran 2025, Laporan Arus Kas disusun oleh BPKAD Provinsi Sumatera Utara, mencakup seluruh

arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Laporan ini bertujuan memberikan informasi yang jelas mengenai posisi kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran. Arus kas dari operasi mencerminkan penerimaan dan belanja rutin, arus kas investasi digunakan untuk pengadaan aset tetap, dan arus kas pembiayaan mendukung penutupan defisit atau pembiayaan program strategis. Penyusunan laporan triwulanan dan semesteran memastikan pemantauan likuiditas daerah secara berkelanjutan sebelum laporan final diaudit.

**Tabel 6 Data Perbandingan Analisis Perubahan Ekuitas (LPE) Sumatera Utara Periode 2023-2025**

Uraian	2023	2024	2025
<b>Ekuitas Awal</b>	Rp18,72 T	Rp21,57 T	±Rp20 T
<b>Ekuitas Akhir</b>	Rp18,99 T	±Rp21,3 T	±Rp20,1 T
<b>Surplus LO</b>	Rp557,73 M	-	Proyeksi positif
<b>Tren</b>	Naik	Turun	Stabil

Pada Tahun Anggaran 2023, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menunjukkan ekuitas akhir sebesar Rp18.992.438.519.539, meningkat dari ekuitas awal Rp18.724.819.349.522. Kenaikan ini terutama didorong oleh surplus Laporan Operasional (LO) sebesar Rp557.734.909.117 dan penyesuaian koreksi serta transaksi antar entitas pemerintah daerah. Peningkatan ekuitas mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan dan kemampuan daerah dalam mempertahankan aset bersih, sekaligus menunjukkan stabilitas fiskal dan kapasitas pembiayaan Pembangunan. Memasuki Tahun Anggaran 2024, ekuitas awal tercatat sebesar Rp21,57 triliun. Laporan tersebut menunjukkan adanya penurunan ekuitas melebihi Rp200 miliar, yang menandakan penyesuaian aset bersih pemerintah daerah akibat realisasi belanja, penyusutan aset, atau koreksi akun tertentu. Penurunan ini menjadi indikasi bahwa meskipun pemerintah daerah mampu menghasilkan surplus, beberapa faktor seperti alokasi belanja dan penyesuaian akuntansi berdampak pada posisi ekuitas bersih. Untuk Tahun Anggaran 2025, proyeksi LPE menunjukkan ekuitas awal sekitar Rp20 triliun, dengan asumsi surplus LO dan koreksi kebijakan menghasilkan ekuitas akhir sekitar Rp20,1 triliun. Proyeksi ini berdasarkan Ranperda P-APBD 2025 dan mempertimbangkan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transfer pusat. Kondisi ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi dalam mempertahankan ekuitas daerah di tengah penyesuaian anggaran, serta menunjukkan perencanaan keuangan yang berhati-hati untuk menjaga keseimbangan fiskal dan kapasitas pembiayaan pembangunan.

**Tabel 7 Data Perbandingan Analisis Perubahan Ekuitas (LPE) Sumatera Utara Periode 2023-2025**

Uraian	2023	2024	2025
<b>Basis Akuntansi</b>	Kas & Akrua	Akrua	Akrua
<b>Temuan BPK</b>	Rp138,87 M + Tirtanadi Rp5,59 M	Utang Rp3,24 T	Evaluasi kualitas proyek
<b>Opini</b>	-	WTP	WTP (dengan catatan)
<b>Fokus Perbaikan</b>	Pengawasan proyek	Realisasi belanja	Penyesuaian fiskal

Pada Tahun Anggaran 2023, CaLK menunjukkan ekuitas akhir sebesar Rp157,54 miliar per 31 Desember 2023. Laporan ini memuat rincian belanja dan pendapatan, menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Temuan BPK

mencatat potensi kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp138,87 miliar, serta permasalahan pada BUMD Perumda Tirtanadi senilai Rp5,59 miliar. CaLK 2023 menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam proyek infrastruktur, namun secara keseluruhan mencerminkan transparansi dan kepatuhan terhadap UU Keuangan Negara, Perbendaharaan, dan Pemerintahan Daerah. Memasuki Tahun Anggaran 2024, CaLK mengungkap utang belanja dan utang jangka pendek sebesar Rp3,24 triliun, yang timbul akibat perencanaan APBD yang tidak sepenuhnya sesuai kapasitas keuangan daerah. BPK menyoroti kekurangan volume dan mutu pada 21 paket pekerjaan jalan/jembatan, serta ketidaksesuaian kontrak pada proyek strategis. Selain itu, pembayaran tambahan penghasilan ASN dan pertanggungjawaban BOSP di 30 sekolah ditemukan tidak sesuai ketentuan. Meski demikian, BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WIP) atas laporan keuangan 2024, dengan catatan penekanan pada temuan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat 5,20% (y-on-y) pada Triwulan III 2024, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan penyelenggaraan PON XXI, yang mendukung stabilitas fiskal meskipun terdapat tantangan dalam realisasi belanja. Untuk Tahun Anggaran 2025, CaLK disusun untuk menjelaskan realisasi APBD senilai lebih dari Rp13 triliun, termasuk analisis Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Fokus kebijakan diarahkan pada penyesuaian fiskal daerah melalui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), agar sesuai dengan dinamika nasional dan regional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga serta investasi PMDN dan PMA. BPK memberikan catatan terkait kualitas pekerjaan jalan/jembatan, realisasi belanja, dan tunjangan ASN agar sesuai ketentuan. CaLK 2025 memuat rincian pendapatan, belanja, posisi aset, dan ekuitas per semester untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada periode 2023-2025 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL/SILPA), terlihat adanya dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp14,80 triliun dengan belanja Rp14,12 triliun menghasilkan surplus fiskal yang menunjukkan pengelolaan anggaran relatif efektif. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan pendapatan menjadi Rp13,23 triliun atau 89,62% dari target yang disebabkan oleh penyesuaian transfer pemerintah pusat, fluktuasi penerimaan pajak daerah, serta kondisi ekonomi yang regional. Pada tahun 2025, pemerintah daerah kembali menyesuaikan target pendapatan melalui perubahan APBD menjadi Rp12,546 triliun sebagai upaya untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Sementara itu, SILPA tahun 2023 yang mencapai Rp1,07 triliun menunjukkan masih adanya sisa anggaran yang cukup besar akibat efisiensi belanja atau keterlambatan pelaksanaan program. Penurunan SILPA secara signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp10,99 miliar menunjukkan adanya peningkatan optimalisasi serapan anggaran oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip dari pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan APBD.

Selanjutnya, analisis terhadap Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Arus Kas (LAK) menunjukkan bahwa struktur keuangan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah mencapai Rp8,12 triliun, yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang cukup baik. Namun, pada tahun 2024 dan tahun 2025 terjadi penyesuaian pendapatan akibat perubahan kondisi ekonomi serta kebijakan fiskal daerah. Dalam Laporan Operasional, pemerintah daerah mencatat surplus operasional meskipun terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kelebihan pembayaran proyek infrastruktur. Sementara itu, Laporan Arus Kas (LAK) menunjukkan bahwa aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan relatif stabil serta mampu menjaga likuiditas kas daerah untuk mendukung pembangunan. Penyajian laporan tersebut telah mengikuti prinsip akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabilitas.

Selain itu, analisis terhadap Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menunjukkan adanya perubahan nilai ekuitas yang dipengaruhi oleh surplus operasional, penyesuaian aset, serta koreksi akuntansi dalam laporan keuangan daerah. Peningkatan ekuitas pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan aset bersih pemerintah daerah, sementara penurunan pada tahun 2024 mencerminkan adanya penggunaan aset daerah untuk pembiayaan Pembangunan serta adanya penyesuaian akuntansi. CaLK berperan penting dalam menjelaskan secara rinci setiap perubahan dalam laporan keuangan serta mengungkap temuan audit seperti potensi kelebihan pembayaran proyek infrastruktur dan munculnya utang belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemerintah daerah masih perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pembangunan. Keberadaan CaLK dan sistem pelaporan berbasis akrual menjadi instrumen penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung terwujudnya prinsip *good governance*.

Dari hasil analisis periode 2023-2025 menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* menjadi strategi yang secara langsung relevan dan aplikatif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Melalui implementasi SAP berbasis akrual ini, pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat mampu untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan komprehensif, mencakup pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, serta surplus dan defisit operasional. Selain itu, tindakan lanjut atas temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengawasan internal, khususnya pada proyek infrastruktur dan pengelolaan belanja modal. Dengan demikian, *good governance* tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga telah diintegrasikan dalam praktik pengelolaan APBD, pengendalian kas, serta evaluasi kinerja perangkat daerah.

Secara strategis, bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, *good governance* diarahkan untuk memperkuat kepercayaan publik, menjaga stabilitas fiskal, dan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Transparansi laporan keuangan dan opini WTP dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Optimalisasi PAD yang dominan dari pajak daerah menunjukkan kemandirian fiskal yang terus ditingkatkan, sementara penyesuaian APBD tahun 2025 mencerminkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi regional. Dengan mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan hukum dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menjadikan *good governance* sebagai strategi yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, serta memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada periode 2023-2025 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL/SILPA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dapat disimpulkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah berjalan dengan cukup baik dan mampu untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara relatif stabil meskipun terdapat fluktuasi pada realisasi pendapatan dan belanja daerah selama periode penelitian. Surplus fiskal pada tahun 2023, optimalisasi serapan anggaran pada tahun 2024 yang ditunjukkan dengan penurunan SILPA, serta penyesuaian kebijakan fiskal pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan pengelolaan anggaran secara adaptif terhadap dinamika kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, dominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pajak daerah, menunjukkan adanya upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Implementasi SAP berbasis akrual juga berkontribusi dalam mendukung penerapan prinsip *good governance* di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang tercermin dari meningkatnya transparansi laporan keuangan, adanya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta adanya upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan daerah. Hal ini diperkuat dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, belum optimalnya sistem informasi keuangan daerah, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat sistem pengawasan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi agar implementasi SAP berbasis akrual dapat semakin efektif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta Pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

**Daftar Pustaka**

1. Aini, L., Sinambela, R. A., Fayza, S., Lubis, P. K. D., & Matondang, K. A. (2025). TATA KELOLA DAN IMPLEMENTASI GOOD FINANCIAL GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI SUMATERA UTARA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KEPADA PUBLIK. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(2), 387-398.
2. Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. (2021). Mewujudkan good governance Melalui Pelayanan publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39-46.
3. Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14323-14334.
4. Suwanda, D., & Santosa, H. (2014). Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman Pada SAP.
5. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
6. Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
8. OECD. (2016). OECD principles of budgetary governance. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264259696-en>
9. Sinambela, L. P., dkk. (2018). Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 145-158.
10. Ratna, D., Hidayat, R., & Sari, M. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif good governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 18(1), 1-15.
11. Putri, R. A., & Siregar, B. (2019). Pengaruh penerapan SAP berbasis akrua terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 312-327.
12. Wibowo, A., & Pamungkas, B. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan SAP terhadap opini audit BPK. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 123-138.
13. Yusuf, M., & Rahman, F. (2021). Implementasi akuntansi berbasis akrua dalam mendukung good governance di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 55-70.
14. Badan Pusat Statistik. (2023). Sumatera Utara dalam angka 2023. BPS Provinsi Sumatera Utara.
15. Badan Pusat Statistik. (2024). Sumatera Utara dalam angka 2024. BPS Provinsi Sumatera Utara.
16. Badan Pusat Statistik. (2025). Sumatera Utara dalam angka 2025. BPS Provinsi Sumatera Utara.
17. Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara <https://share.google/PxI4UzRJBuzbla6Vw>
18. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara <https://share.google/nKXzGZGgXpMbKE9N3>
19. Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan <https://share.google/mGp0gYYq1RuKRZPYJ>
20. Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan <https://share.google/yAM066IFerBpNZ0Db>
21. Sumber: JDIIH Kementerian Keuangan <https://share.google/EDWXU9NUnoYrNxBGd>
22. Indrawati, S. M. (2012). Keuangan negara dan good governance. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
23. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1), 45-56.
24. Sariono, A., & Sitorus, H. (2024). Pengaruh penerapan SAP berbasis akrua terhadap peningkatan akuntabilitas publik.